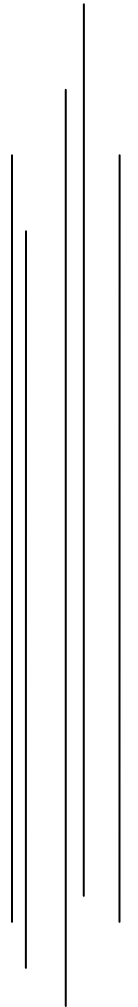




**RENCANA STRATEGI
DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN
KOTA BATAM
2011 - 2016**



**PEMERINTAH KOTA BATAM
KOTA BATAM TAHUN 2011**

KATA PENGANTAR

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 12/2007 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Batam maka dibentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, sehingga perlu dirumuskan Revisi Renstra Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam 2011-2016, khususnya yang terkait Kesejahteraan Sosial dan Taman Pemakaman Umum.

Renstra SKPD ini berisi permasalahan yang dihadapi, sasaran, arah kebijakan yang akan ditempuh serta rencana prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan hierarkinya, Rencana Startegis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Batam 2011-2016.

Renstra-SKPD ini nantinya juga akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial dan Pemakaman yang merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD. Dengan demikian akan terwujud sinkronisasi program antara proses perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

Atas dukungan dari semua pihak akhirnya Renstra ini telah selesai disusun meskipun masih banyak kekurangan dan terima kasih kepada semua yang ikut membantu dan menyumbangkan ide, saran dan pikiran bagi kesempurnaan penyusunan Renstra SKPD ini. Diharapkan juga bahwa apa yang telah direncanakan ini dapat diwujudkan dan membawa hasil serta mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Batam, 10 Oktober 2011

**KEPALA
DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN
KOTA BATAM**

Drs. M. S A H I R
NIP. 19590710 198702 1 002

VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA BATAM

Visi

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”

Misi

1. Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
2. Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari.
3. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan.
4. Menumbuhkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
VISI MISI PEMERINTAH KOTA BATAM.....	iii
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.3 LANDASAN	4
1.4 HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	5
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	10
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTURAL ORGANISASI	10
2.2 SUMBER DAYA DINAS	14
2.3 KINERJA PELAYANAN	16
BAB III. ISU-ISU SRATEGIS	18
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS	19
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	20

3.3	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	23
BAB IV.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	30
4.1	VISI DAN MISI	30
4.2	TUJUAN DAN SASARAN	33
4.3	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	34
4.4	ANALISIS KELAYAKAN PROGRAM	35
BAB V.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	39
5.1	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	39
5.2	INDIKATOR KINERJA	53
5.3	KELOMPOK SASARAN	58
5.4	PENDANAAN INDIKATIF	59
BAB VI.	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	64
6.1	INDIKATOR	64
BAB VII	PENUTUP	66
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagaimana diamanatkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia di dan memajukan dan mewujudkan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesejahteraan Sosial, Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan social secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah maka kegiatan pembangunan di daerah khususnya Kota Batam bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan yang diharapkan dapat mempercepat kemajuan daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Batam dilakukan melalui tahapan musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan,

Kecamatan dilanjutkan dengan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan hasil dari musyawarah tingkat kecamatan dan hasil reses dewan. Dengan metode perencanaan button up seperti ini diharapkan aspirasi masyarakat dapat terjaring dan tersalurkan serta di tindak lanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan skala prioritas.

Hasil dari forum SKPD akan di bahas lagi pada Musrenbang tingkat Kota yang merupakan rangkaian terakhir untuk mendapatkan masukan dari semua perwakilan atau lapisan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam akselerasi pembangunan Kota Batam.

Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Batam yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 yang sebelumnya Dinas Sosial Kota Batam sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2003.

Pembentukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam tentunya tetap mengacu pada Misi Strategis Kota Batam yaitu pada point;

1. Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan kota Batam sebagai bandar dunia madani yang moderen berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan pengelola kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya
2. Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat, laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikas dan tekhnologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari.

3. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, tenaga kerja, Sosial budaya, fasilitas keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas kehidupan manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan.
4. Menumbuh suburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama, dan melestarikan nilai –nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Untuk itu dalam mencapai tujuan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kota Batam SKPD Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam akan terus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi intra SKPD Kota Batam dan pihak terkait hubungannya dengan penanganan masalah Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan partisipasi Sosial.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

A. Maksud

Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam adalah sebagai pedoman/panduan dalam penyusunan kebijaksanaan, program-program strategis yang menjadi acuan dasar dalam pembangunan kesejahteraan Sosial untuk periode 2011-2016.

B. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana strategis Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang urgen dan harus segera diselesaikan dalam rencana pembangunan menengah yang di wujudkan dalam bentuk rencana strategis lima tahunan.

- b. Memperjelas arah dan kebijakan pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial.

1.3 Landasan Hukum

Landasan normatif yang di jadikan acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra SKPD) adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang RI nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Palawan, Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam.
2. Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang RI nomor 25 tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor:050/2020/SJ/ tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
7. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Batam.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Kepri Tahun 2005-2025,
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepri No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2010 – 2015.
10. Peraturan Wali Kota Batam nomor 26 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam.

1.4 Hubungan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Rencana Strategis ini menjadi acuan bagi dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam untuk periode 2011-2016.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam ini tidak terlepas dari dokumen perencanaan lain yang telah ada, antara lain :

1. Dokumen usulan program pembangunan yang berasal dari masyarakat yang telah dibahas ditingkat Kelurahan, Kecamatan maupun pada tingkat Kota Batam.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011-2016
3. Dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Bagian dan Bidang - bidang dilingkungan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam
4. Dokumen perencanaan yang dibuat oleh instansi lainnya baik melalui dana APBD Kota Batam, APBD I, APBN, maupun perencanaan yang dibuat dengan sumber dana lainnya

Disamping berpedoman pada dokumen-dokumen usulan program atau perencanaan-perencanaan tersebut di atas, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam ini juga dapat berpedoman kepada hasil Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam.

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor.25 tahun 2004, keberadaan Rentsra Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Tahun 2006-2011 juga merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJM Selanjutnya, untuk

setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam tahun 2011 – 2016, di susun dengan sistematika sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra SKPD, maksud dan Tujuan penyusunan, landasan normatife penyusunan, hubungan dokumen perencanaan lainnya, serta pola pikir dan sistematika penyusunan.

Bab II Gambaran Umum

Bab ini berisi Gambaran Umum tentang Tupoksi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam terkait, uraian Tugas, serta kondisi SDM dan memuat bagan Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

Bab III Isu-isu Strategi Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi yang terkait dengan isu strategi yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, serta Potensi permasalahan dan peluang serta kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Dan sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi Visi, Misi, tujuan, sasaran dan Strategi, sesuai dengan RPJM SKPD Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

Bab V Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan indikatif

Bab ini menjelaskan rencana program dan judul kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. membuat matrik Kepmendagri no. 54 tahun 2010.

Bab VI Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam. Bab ini memuat tentang Indikator yang sudah termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2011 – 2016)

Bab VII Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra SKPD Dinas Sosial dan pemakaman Kota Batam, dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan kepala SKPD Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas Pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah sesuai bidangnya yaitu membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yaitu;

1. Tugas

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Sosial dan Pemakaman serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota Batam.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batam.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program dan kegiatan Dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang,
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi keuangan serta urusan umum dan kepegawaian,
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang social dn permakaman,
- d. Penyelenggaraan Kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pemberdayaan social , bidang penyelenggaraan dan rehabilitasi social, bidang bantuan dan jaminan social dan permakaman,

- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya,
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsure terkait lainnya dengan setiap penyelenggaraan kegiatan dinas,
- h. Pelaksanaan tuga-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkungan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubbag Keuangan
 - Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin
 - Kasi Pemberdayaan Kemitraan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
 - Kasi Pemberdayaan Komonitas adat terpencil dan Penyuluhan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - Kasi Pelayanan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia
 - Kasi Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Penyalahgunaan Narkotika dan Pengguna Zat adiktif lainnya
- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
 - Kasi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana
 - Kasi Jaminan Sosial dan Pengelola Sumber Dana Sosial
 - Kasi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
- f. Bidang Pemakaman
 - Kasi Sarana dan Prasarana Pemakaman
 - Kasi Pengguna dan Pengawasan Pemakaman
 - Kasi Peran Serta Masyarakat

2.2 Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam didukung oleh personel/ SDM sebanyak 59 orang dengan uraian sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

NO	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Struktural	-	-	15	8	23
2.	Fungsional	-	-	-	-	-
3.	Staf Tata Usaha	-	4	6	-	10
4.	Arsiparis	-	3	8	1	12
5.	THL	1	-	-	-	1
6.	Honor Kantor	-	-	-	-	-
Jumlah		1	7	29	9	46

2. Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		SD/ SMP	SMU	D3/S1	S2	
1.	Struktural	-	3	2/18	-	23
2.	Fungsional	-	-	-	-	-
3.	Staf	-	5	5	-	10
4.	Arsiparis	-	2	1/3	-	6
5.	THL	1	-	-	-	1
6.	Honor Kantor	2/1	14	1/1	-	19
Jumlah		4	24	32	-	59

Sarana dan prasarana (Barang Milik / Kekayaan Daerah (BM/KD) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam per 3 Oktober 2011 sebagai berikut

3. Tabel Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Satuan	Jumlah/ Luas	Nilai (Rp)
1.	Tanah	M2		10,434.351,007
2.	Gedung dan Bangunan Kantor	Unit	2	1,336,872,461,35
3.	Gedung dan Bangunan Aulla	Unit	1	-
4.	Taman Makam Pahlawan "Bulan Gebang" Batam	Ha	2	-
5.	Gedung Panti Ressos "Nilam Suri"	Komplek	1	6,300,000,000
6.	Kendaraan Roda 4	Unit	6	626,200,000
7.	Kendaraan Roda 6	Unit	3	502,355,000
8.	Kendaraan Roda 2	Unit	12	46,735,000
9.	Peralatan & Perlengkapan Kantor	Unit	963	1,092,728,182
10.	DII			-
Jumlah				19,719,303,650.35

4. Komposisi Pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Tahun 2011

No	KETERANGAN	JUMLAH PEGAWAI (Orang)
1.	Esselon II b	1
2.	Esselon III a	1
3.	Esselon III b	4
4.	Esselon IV a	16
5.	Esselon IV b	1
6.	Staf PNS	16
7.	Staf PTT	1
8.	Staf Honor Kantor	19
JUMLAH		59

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinsos, 2011

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dilakukan berdasarkan sasaran/target Renstra tersebut pada periode sebelumnya dan menurut Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dan/atau indikator lainnya seperti Milenium Development Goals (MDGs) atau indikator lainnya yang secara resmi telah diratifikasi oleh pemerintah.

Interpretasi tentang pelayanan kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan pelayanan dan target mana saja yang telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut, hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Interpretasi di atas sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (SDM), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hal ini ditujukan untuk

menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, hasil telaahan dan hasil analisis ini berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan pola pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, fungsi pelayanan SKPD

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, saat ini mempunyai beberapa persoalan pokok yang menjadi fokus atau perhatian bersama, bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Bantuan dan Jaminan /Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pemakaman. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat yang berada di Kota Batam terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari

indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan Kesejahteraan Sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Kota Batam telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam lima pilar intervensi masih sangat terbatas,
2. Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain,
3. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di Kota Batam, yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran masih terbatas,
4. Peran pemerintah Pusat yang masih dominan dalam pelayanan Program Pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,

5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,
6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
8. Ketersediaan lahan dan Penataan Pemakaman yang belum memadai,
9. Payung Hukum (Perda) tentang pengelolaan Pemakaman belum ada.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap

kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Melihat kondisi saat ini maupun untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam berupaya untuk dapat meningkatkan kemajuan kondisi sosial masyarakat yang berada di Kota Batam terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi social (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati

Dengan adanya telaah tentang visi dan misi kepala daerah maupun wakil kepala daerah maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menjadi penghambat dalam pelayanan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam antara lain; kemiskinan (atau kefakirmiskinan), kecacatan, ketelantaran, ketunaan sosial, keterasingan, korban bencana, korban tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi, penataan dan pengelolaan Taman Pemakaman Umum (TPU) yang belum memadai.

Selain dari pada itu ada pula faktor yang dapat mejadi pendorong atau akselerasi untuk percepatan didalam rencana stretegi SKPD Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam salah satu isu strategis Pemerintah Kota Batam

adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dalam hal ini akan sangat berpengaruh terhadap potensi penambahan permasalahan sosial hubungannya dengan program Pelayanan, rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kemiskinan, dimana sasarannya adalah masyarakat yang belum beruntung terutama di lihat dari aspek pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan tingkat kesejahteraan bagi bagi masyarakat sehingga tercipta kemandirian hidup yang berkualitas. inilah salah satu yang menjadi faktor percepatan didalam program renstra SKPD.

Dalam kaitannya dengan identifikasi dan inventarisasi persoalan-persoalan diatas maka dipandang perlu untuk dilakukan telaah visi dan misi kepala daerah maupun program kerja kepala daerah secara umum, dan wajib untuk diketahui, adapun visi Walikota Batam yaitu ;

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang modern dan menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”

dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam mengemban misi Walikota Batam yakni pada misi ke 3 yaitu; ***“Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketakwaan, kepemudaan dan olah raga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan”***,

dan misi ke 4 yaitu;

“Menumbuh suburkan kehidupan harmonis berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama, dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan local dan memelihara kelestarian lingkungan hidup”

melihat dari visi dan misi Walikota Batam yang kemudian diamanatkan kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, maka kemudian dibuatlah menjadi beberapa program yang bersentuhan langsung dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan antara lain;

1. Program Umum; yang terdiri dari pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kualitas dan disiplin aparatur.
2. Program Pelayanan, Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penanggulangan kemiskinan; Bantuan permakanan bagi anak panti asuhan, bimbingan dan keterampilan PMKS (anak jalanan, anak terlantar, penyandang cacat, dll), Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan stimulant bagi lanjut usia tidak mampu, bantuan pemulangan orang terlantar dan pemulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migrant, Pengendalian dan pengawasan PMKS, pendampingan Program Keluarga harapan,
3. Program Penanganan bencana serta jaminan social; Kesiapsiagaan dan tanggap darurat korban bencana,

4. Program Penataan Taman Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan “Bulan Gebang” Kota Batam;

Jadi dari misi 3 Walikota Batam yang diambil dan bersentuhan langsung yakni untuk meningkatkan pelayanan prima terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, sosial budaya maupun kualitas hidup manusia dan pada akhirnya lapisan masyarakat dapat meningkatkan kehidupan sehingga kemiskinan dapat dientaskan.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.

Berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan bagaimana cara memberdayakan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dari kompleksnya permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kota Batam, pelayanan sosial yang telah dilaksanakan, Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Batam telah dapat mengidentifikasi terhadap PMKS dan Pengelolaan Taman Pemakaman Umum ke dalam delapan strategis, yakni :

1. kemiskinan (atau kefakirmiskinan),

2. kecacatan,
3. ketelantaran,
4. ketunaan sosial,
5. keterasingan,
6. korban bencana,
7. korban tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi,
8. penataan dan pengelolaan Taman Pemakaman Umum (TPU) yang belum memadai.

Pengelompokan ini dapat memudahkan strategi dalam penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Di dalam tujuh isu Kesejahteraan Sosial dan di tambah satu isu Bidang Pemakaman tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain; anak nakal, anak jalanan, korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, Tuna susila, pengemis atau tunawisma, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, Korban penyalahgunaan napza, KAT, keluarga bermasalah Sosial Psikologis, Korban Bencana, Pekerja migrant bermasalah, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Keluarga fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan Keluarga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal lain masalah Penataan Taman Pemakaman Umum yang masih perlu pembenahan dan penyiapan dari mulai Penyediaan kebutuhan Lahan sampai dengan Pola Penataan TPU yang memadai sampai dengan lima tahun kedepan.

Namun demikian di samping banyaknya kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sangat besar tantangan yang dihadapi, apalagi kota Batam menjadi salah satu daerah Perdagangan Bebas (Free trade Zone) di Provinsi Kepulauan Riau ini, ini akan semakin menambah berbagai permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyak yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kota Batam tahun 2006-2010, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, factor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam tetapi juga ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Selama kurun waktu 2006-2010, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, yang dapat menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja pada masa yang akan mendatang jika tidak segera diberi perhatian seperti konstelasi faktor internal organisasi Dinas Sosial dan faktor eksternal.

1. Data PMKS/PSKS yang telah dibina s.d th. 2010

NO	PMKS	POPULASI (2010)	JUMLAH YANG SUDAH DITANGANI	PSKS	POPULASI S.D (2011)	JUMLAH YANG SUDAH DITANGANI
1	KORBAN BENCANA ALAM		36	KARANG TARUNA (KT)	58	
2	KORBAN BENCANA SOSIAL		16	TARUNA SIAGA BENCANA	74	74
3	RTSM /PKH	4664	3469	PSM	41	15
4	ANAK NAKAL	-	-	TKSK	12	12
5	ANAK JALANAN	125	5	ORSOS	110	
6	KORBAN NAPZA			PANTI ASUHAN	64	44
7	ORANG TERLANTAR DAN PEKERJA MIGRAN	-	449	PERINTIS KEMERDEKAAN VETERAN	20	20
8	WANITA TUNA SUSILAWTS	635	55	PPCI KOTA BATAM	1	1
9	WARIA	218	-			
10	PENYANDANG CACAT	566	21			
11	GEPENG	297	70			
12	LANSIA TERLANTAR	938	25			
13	BEKAS NAPI	-	-			
14	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	625	13			

Sumber : Subbag Perencanaan dan Evaluasi, 2011.

2. Jumlah dan Sebaran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2011

NO	KECAMATAN	JENIS KELEMBAGAAN					KET.
		KT/TAGANA	PSM	TKSK	ORSOS/YAYASAN	PANTI ASUHAN	
1	Sekupang	7/24	5	1	14	9	
2	Lubuk Baja	5/4	2	1	22	1	
3	Batu Ampar	4/7	4	1	7	3	
4	Bengkong	4/7	4	1	3	5	
5	Batam Kota	6/8	1	1	24	6	
6	Batu Aji	4/12	4	1	6	6	
7	Sagulung	6/1	4	1	12	6	
8	Sei Beduk	4/6	3	1	5	2	
9	Nongsa	5/2	5	1	8	4	
10	Blp. Padang	5/3	4	1	7	1	
11	Bulang	4/0	4	1	1	2	
12	Galang	4/0	1	1	1	8	
	J U M L A H	58/74	41	12	110	44	

Sumber : Subbag Perencanaan dan Evaluasi, 2011

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku,

ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang Permasalahan Sosial.

Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM masyarakat Kota Batam sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup masyarakat Kota Batam. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat masyarakat.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2011-2016, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap

- a) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional,
- b) kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2011-2016, serta
- c) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 2011-2016.

Tantangan eksternal yang akan dihadapi Dinas Sosial Kota Batam mencakup perubahan lingkungan global, regional, dan nasional. Dalam lingkungan global, Dinas Sosial Kota Batam menyadari nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial di antara sesama Warga Masyarakat yang memerlukan perhatian lebih serius.

Isu kemiskinan lebih mengedepan bersama kesempatan kerja dan integritas sosial diakui bahwa kemakmuran dunia yang ditandai dengan ukuran peningkatan *Gross National Product* (GNP), tetapi pengangguran juga meningkat dan disintegrasi sosial semakin menjadi-jadi.

Dua hal pokok seperti pemenuhan kebutuhan hidup dan keadilan sosial dan Penataan maupun Pengelolaan Pemakaman/Taman Pemakaman Umum (TPU) akan menuntut penanganan lebih lanjut secara konsisten dan bersungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah Kota Batam melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batam sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam antara lain dilakukan dengan cara pembahasan melalui forum *diskusi, rapat koordinasi* bersama dengan melibatkan antar Dinas dan bidang-bidang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk merumuskan isu-isu strategis, selain itu digunakan pula metode pembobotan dengan cara menentukan

prioritas terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, isu-isu strategis tersebut antara lain ditetapkan sebagai berikut;

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
3. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur
4. Meningkatnya Pembinaan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meningkatnya Pembinaan Terhadap Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
6. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial, Kemitraan Sosial , Partisipasi Sosial dan Advokasi Sosial.
7. Pendayagunaan TMP/TMB Sebagai Sarana Pelestarian Dan Pengamalan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan.
8. Pendayagunaan, Pengelolaan dan Pengawasan Taman Pemakaman Umum

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman

“ TERWUJUTNYA PELAYANAN SOSIAL YANG PRIMA DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ”

1. Visi

Adapun **makna dari Visi** sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Sosial mengandung arti usaha melayani kebutuhan orang lain sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan total pelayanan sosial (*total social services*) yang dinamis, sensitif, dan komprehensif.
- b. Pelayanan Sosial juga dapat diartikan terbentuknya sistem pelayanan terhadap pemenuhan akan kebutuhan dan pengembangan sosial untuk masing-masing individu, sehingga mereka mampu melakukan penyesuaian otomatis terhadap perubahan sosial yang sangat cepat, sambil meningkatkan kualitas hidup manusia sesuai hak azasi universal.
- c. Prima adalah sangat baik/utama, mengandung arti bahwa dalam pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maupun terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu penanganan secara komprehensif dengan mempertimbangkan

faktor-faktor penyebab tumbuh kembangnya permasalahan sosial dimaksud dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

- d. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kondisi sosial kota Batam yang kurang menguntungkan sebagai akibat dari dampak industrialisasi secara otomatis akan berpengaruh terhadap kehidupan warga masyarakat, Kota Batam.

Visi tersebut juga mengandung arti bahwa Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk ke dalam kategori Pelayanan PMKS secara prima pada tahun 2016. Kondisi ini merupakan tujuan yang realistis yang dapat dicapai selama periode lima tahun pelaksanaan RPJMD 2011-2016 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

Secara konstitusional, visi ini merupakan jawaban terhadap amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 di mana Fakir Miskin dan Anak Telantar dipelihara oleh Negara. Undang Undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan bagaimana cara mensejahterakan fakir miskin dan anak telantar, hanya mewajibkan kepada Negara untuk memberikan proteksi terhadap fakir miskin dan anak telantar, di mana kedua kelompok sasaran ini termasuk ke dalam PMKS. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjawab pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS termasuk di dalamnya fakir miskin dan anak telantar.

Dengan demikian, visi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Batam sebagaimana tersebut di atas memiliki relevansi yang kuat dengan Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang Undang lainnya, serta MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015. Oleh karena itu perlu ada komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi tersebut.

2. Misi

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Sosial Dan Pemakaman mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam menetapkan **misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
2. Mengembangkan prakarsa dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial berbasis nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
3. Meningkatkan pelayanan dan Pengelolaan Taman Pemakaman secara optimal.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

1. Tujuan

Tujuan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam tahun 2011-2016 adalah:

- a. Melindungi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari segala risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- b. Terwujudnya aksesibilitas, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan social dasar, penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;

- c. Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks-penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
3. Sasaran Jangka Menengah SKPD.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Batam. Selama lima tahun ke depan sesuai dengan misi dan arahan RPJMD 2011-2016 tersebut di atas, perlu dibuat suatu strategi dan arah kebijakan yang utuh dan menyeluruh. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang menuntun segenap komponen aparatur Dinas Sosial Dan Pemakaman dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut dan menyikapi dinamika Pembangunan Bidang Sosial, maka strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2011-2016 dirumuskan berdasarkan pada;

1. RPJMD Tahun 2011-2016,
2. Evaluasi capaian pembangunan Kesejahteraan Sosial sampai tahun 2010,
3. Kebijakan dan prioritas Pimpinan Daerah,
4. Komitmen Pemerintah pada Konvensi Internasional mengenai Kemiskinan, khususnya tentang penurunan separuh penduduk miskin dunia hingga tahun 2015 yang termuat dalam konvensi *Millenium Development Goals* (MDGs), dan

5. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Daerah No.12 tahun 2007 tentang Tata Laksana Organisasi Dinas, Badan, dan Kantor Pemerintah Kota Batam. Adapun ada beberapa poin arah Kebijakan yang dapat dikelompokkan yaitu;
- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Yang Mendukung Pemberdayaan Sosial, Kemitraan Sosial, Partisipasi Dan Advokasi Sosial.
 - b. Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Sosial Baik Dilaksanakan Oleh Pemerintah, Masyarakat Dan Dunia Usaha Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - c. Membangun Ketahanan Sosial Yang Mampu Memberi Pelayanan Dan Pemberdayaan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - d. Tertatanya Taman Pemakaman Yang Hijau, Indah, Tertib Dan Teratur.

4.4 Analisis Kelayakan Program

Kelayakan pelaksanaan Rencana Strategi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities and Treats) yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenghts) kekuatan dari Renstra Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial adalah :
 - a. Adanya upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak mampu (miskin)

- b. Tersediannya sarana dan Prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang semua kegiatan
 - c. Adanya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi PMKS dan mengembangkan PSKS.
 - d. Tersedianya dana dari pemerintah daerah dan pengusaha maupun LSM, sehingga dapat menumbuhkan swadaya masyarakat
2. Kelemahan (Weakness)
- a. Program bimbingan social dan bantuan usaha ekonomi produktif maupun melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) contoh melalui budi daya ikan kerapu, rumput laut dan kegiatan lain yang dapat diterapkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir (pencaharian Nelayan) begitu juga bagi masyarakat yang tinggal di Perkotaan apa yang dapat diterapkan tentu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat itu sendiri, merupakan tawaran program, sehingga untuk mengetahui efektif tidaknya membutuhkan waktu, penyebaran yang akurat kepada warga masyarakat tentang maksud dan tujuan serta manfaat program.
 - b. Program ini memerlukan dana yang cukup besar, karena jumlah peserta/masyarakat berpenghasilan rendah dimungkinkan bertambah.
Hal ini mengingat banyak warga masyarakat/komunitas adat terpencil Suku Laut yang berada di sekitar Pemukiman Pulau Bertam dan masyarakat pesisir lainnya.

c. Diperlukan koordinasi yang mantap ditingkat pelaksana kegiatan, agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

3. Kesempatan (Opportunities)

Program ini tepat untuk dilaksanakan, karena di dalam kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat Miskin termasuk KAT (suku laut) untuk meningkatkan penghasilan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan program tersebut juga dapat diperolehnya kesempatan bagi warga binaan atau masyarakat luas untuk meningkatkan usaha di dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya.

4. Ancaman (Treats)

a. Ancaman yang berasal dari dalam keluarga tidak mampu (miskin) yaitu dapat menimbulkan perasaan tidak yakin akan program yang akan dikerjakan itu akan dapat mendapatkan hasil, hal ini mungkin dikarenakan mereka tidak memahami misi dari program tersebut, atau kondisi sumber daya manusia itu sendiri yang belum siap untuk mencoba melakukan peningkatan usaha. Sumber daya alam juga tidak kalah penting dapat menentukan berjalan tidaknya usaha yang akan dilakukan, khususnya masyarakat Nelayan dengan ketergantungan dengan Alam (laut).

b. Ancaman dari luar antara lain dari warga masyarakat karena kurangnya pengertian atau

tenggang rasa sesama warga, dan sikap iri yang sering muncul dapat mempersulit program.

- c. Tumbuhnya sikap ketergantungan dari pihak Masyarakat tidak mampu (miskin) dan KAT suku laut terhadap bimbingan dan bantuan tersebut. Karena berbagai upaya Penanggulangan kemiskinan sebagai Obyek program bagi Pemerintah dengan berbagai instansinya maupun pihak-pihak lain, sementara sasaran hanya satu yakni masyarakat Miskin, agak sulit mengubah paradigm yang telah tertanam pada Masyarakat Indonesia pada umumnya dan Masyarakat Tidak mampu (miskin) pada khususnya.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program-program pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial dan Pemakaman tahun 2011-2016 diarahkan bagi PMKS, yang ditempuh melalui enam program prioritas dengan indikator dampak (*impact*) yang ingin dicapai diarahkan kepada:

1. peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan Kesejahteraan sosial,
2. peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan
3. peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2011-2016, *cross cutting issue* mengenai keadilan dan kesetaraan gender akan mendapat perhatian karena memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan program yang berkelanjutan.

5.2 Indikator Kinerja

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka Dinas Sosial menyusun strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2011-2016 yang mengintegrasikan tujuan, sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan yang terukur untuk mencapai misi Dinas Sosial yang telah ditetapkan. Adapun strategi, proses dan indikator capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2011-2016 sebagaimana dapat dilihat pada tabel (lampiran) RPJM

Untuk mengukur capaian indikator kinerja dari strategi dan proses yang digunakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial, maka dilakukan pengukuran indikator dengan jumlah sasaran yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Artinya, persentase dihitung berdasarkan pada jumlah PMKS yang diintervensi selama tahun 2011-2016. Bukan pada total populasi PMKS yang ada, baik capaian pertahun maupun capaian selama lima tahun.

Capaian indikator kinerja Dinas Sosial tersebut akan dapat dimungkinkan apabila mendapat dukungan optimal dari APBD dan peran aktif Pemerintah Daerah melalui APBD II , APBD I dan APBN, serta partisipasi aktif masyarakat dan Dunia Usaha. Hal yang lebih penting adalah adanya kemauan politik pemerintah daerah melalui kerangka kebijakan daerah dan kerangka kebijakan anggaran daerah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial PMKS, yang merupakan penyumbang terbesar angka kemiskinan di Kota Batam dan di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, kebijakan dan strategi Dinas Sosial lebih diarahkan pada:

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah.
3. Pemberdayaan sosial dimaksud untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah

kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.

4. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di

luar pengadilan. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan tujuan:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan social yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Memperhatikan hal tersebut di atas maka kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman pada pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan dalam RPJMD Kota Batam 2011-2016 diarahkan untuk:

- (a) Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial.
- (b) Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial.
- (c) Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan social dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta koordinasi.
- (d) Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (e) Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.
- (f) Penataan dan Pengelolaan Taman Pemakaman Umum, yang baik.

Strategi pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan dalam RPJMD 2011-2016 difokuskan pada:

- (a) Kampanye sosial, yang mengandung makna memberikan pemahaman, sosialisasi, penyadaran, dan kepedulian terhadap pelaku pembangunan

kesejahteraan sosial dan penyandang masalah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (b) Kemitraan sosial, yang mengandung makna adanya kerja sama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.
- (c) Partisipasi sosial, yang mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.
- (d) Advokasi dan pendampingan sosial, yang mengandung makna adanya upaya-upaya memberikan perlindungan, pembelaan, dan asistensi terhadap hak-hak dasar warga masyarakat.

5.3 KELOMPOK SASARAN

- 1. Individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik yang tergolong rentan maupun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2. Sumber dukungan penyelenggaraan Usaha kesejahteraan Sosial yang dapat memberikan pelayanan langsung kepada para PMKS antara lain; organisasi Sosial (Orsos), Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), dan Dunia usaha.
- 3. Pengelolaan Taman Pemakaman Umum secara Optimal.

5.4 Pendanaan Indikatif

Rencana anggaran indikatif Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Tahun 2011-2016

NO	PROGRAM KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN DALAM RATUSAN (Rp)					TUPOKSI
		2012	2013	2014	2015	2016	
A	UMUM						
1	Program Pelayanan Adminitrasi Umum	825	825	825	825	825	Dinsos
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	465	400	400	400	400	Dinsos
3	Program Peningkatan Kualitas & Disiplin Aparatur	150	150	150	150	150	Dinsos
	PRIORITAS						
B	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial						
1	Kegiatan Bantuan Permakanan Anak Panti Asuhan (1240 Anak)	225	225	225	225	225	Dinsos
2	Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin & KAT melalui bantuan stimulan UEP /dan KUBE	300	300	300	400	400	Dinsos
3	Kegiatan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana	250	300	400	400	400	Dinsos
4	Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH : 3000 Unit)	6.100	6.700	6.700	6.800	6.800	Dana Hibah
5	Kegiatan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ± 6000 RTSM	150	150	150	150	150	Dinsos/ APBN
6	Kegiatan Bantuan Stimulan Bagi Orang dengan kecacatan (PACA = 576 Orang)	150	175	175	200	225	Dinsos

7	Kegiatan Sosialisasi Tentang nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	150	150	150	150	150	Dinsos
8	Kegiatan Pemulangan Orang Terlantar, Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (200-300 org/bulan)	200	200	200	200	200	Dinsos
9	Kegiatan Bimbingan dan Keterampilan Bagi PMKS (60 Org/Thn)	650	650	650	650	650	Dinsos
10	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia bermasalah	150	150	150	150	150	Dinsos
11	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan PMKS (WTS, Waria, Gepeng, dll)	150	200	250	250	250	Dinsos
12	Kegiatan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Konseling dan kampanye sosial bagi PMKS	50	50	50	50	50	Dinsos
13	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS (Refisi Perda)		150	200			Dinsos
14	Kegiatan Pemberdayaan & Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial /PSKS (Karang Taruna, Organisasi Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	300	300	300	300	300	Dinsos
C.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman						Dinsos
1	Kegiatan Penyediaan Lahan Pemakaman (8Ha selama 5 TH)			200	200	200	B.Pertanahan, OB/DK
2	Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Aset Lahan TPU dan Pemakaman bagi Tunawan	100	100	100	100	100	Dinsos
3	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, norma, standar, prosedur (perda		150			250	Dinsos

	pemakaman) dan Pembentukan UPT Pemakaman						
4	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU & TMP	350	400	400	400	400	Dinsos
5	Kegiatan DED Gerbang Taman Makam Pahlawan "Bulan Gebang"		75				Dinsos
6	Kegiatan Detail Estimate Design (DED) Pemakaman Terpadu		75	75	75	75	Dinsos
TOTAL		5.715	6.225	5.925	6.075	5.925	

BAB. VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD)

6.1 Indikator

Adapun strategi, proses dan indikator capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Tahun 2011-2016 sebagaimana dapat dilihat pada tabel... (lampiran).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja dari strategi dan proses yang digunakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial, maka dilakukan pengukuran indikator dengan jumlah sasaran yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Artinya, persentase dihitung berdasarkan pada jumlah PMKS yang diintervensi selama tahun 2011-2016. Bukan pada total populasi PMKS yang ada, baik capaian pertahun maupun capaian selama lima tahun.

Capaian indikator kinerja Dinas Sosial tersebut akan dapat dimungkinkan apabila mendapat dukungan optimal dari Pemerintah Daerah dan alokasi dana dari APBD I / APBN serta partisipasi aktif masyarakat dan Dunia Usaha. Hal yang lebih penting adalah adanya kemauan politik pemerintah daerah melalui kerangka kebijakan daerah dan kerangka kebijakan anggaran daerah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial PMKS, yang merupakan penyumbang terbesar angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam.

Indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam tahun 2011-2016.

Perumusan indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2011-2016;
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2011-2016; dan
3. Identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2011-2016.

BAB VII

PENUTUP

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Strategi (Rensra) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam tahun 2011-2016 ini diharapkan akan memberikan arah ataupun gambaran sebagai bentuk implementasi dari misi-misi yang telah ditetapkan diatas guna mewujudkan visi :

“Terwujudnya Pelayanan Sosial yang Prima dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial”

serta sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam untuk periode berjalan yakni tahun 2011-2016

Selanjutnya, Rensra Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam ini selayaknya dievaluasi maupun monitor secara berkala sehingga apabila terjadi perubahan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya, agar dapat selaras dengan visi Kota Batam untuk dapat mewujudkan Batam menuju Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Renstra ini telah selesai kami susun, namun dalam penyusunan masih banyak kekurangan baik narasi maupun penyusunan kalimat-perkalimat jadi masih jauh dari sempurna, untuk itu jika ada sesuai yang kurang pada tempatnya mohon kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Demikian disampaikan seluruh pihak yang terkait dalam perencanaan maupun penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal, 10 Oktober 2011

WALIKOTA BATAM,

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Lampiran

Rencana Strategi Tahun 2011-2016

Dinas Sosial & Pemakaman Kota
Batam

